

Judul : Golkar Minta KPK Usut Kader Parpol Lain: Jangan Hanya Novanto Dijerat Kasus E-KTP
Tanggal : Senin, 18 Desember 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 6

Golkar Minta KPK Usut Kader Parpol Lain

Jangan Hanya Novanto Dijerat Kasus E-KTP

[JAKARTA] Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Dave Laksono meminta KPK mengungkap dugaan keterlibatan kader parpol lain dalam kasus KTP elektronik atau e-KTP. Sebab, hingga saat ini baru satu politisi yang juga mantan Ketua DPR Setya Novanto dari Golkar yang diseret ke meja hijau.

"Kita mendukung agar dibuka semua permasalahan. Jangan semua dibebankan ke satu titik, Pak Setya Novanto, jangan hanya Golkar yang kena," kata Dave akhir pekan lalu.

Karena itu, lanjut Dave, pihaknya sudah meminta agar Novanto membongkar semuanya. Hal itu karena dalam dakwaannya disebutkan nama-nama tokoh partai lain ikut terlibat kasus e-KTP. Bahkan, mereka saat ini ada yang menjabat sebagai menteri dan gubernur.

Ia mengaku prihatin adanya nama-nama petinggi partai lain yang hilang dari dakwaan Novanto. Tiga nama itu adalah



FOTO-FOTO: DOK.SP
Dave Laksono

Ferry Juliantono

politisi PDI Perjuangan seperti Menkumham Yasonna Laoly, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Kenapa pada dakwaan kemarin hilang nama-nama tersebut? Sementara di media terus disebarluaskan nama-nama tersebut yang

menerima sejumlah uang segini, segitu. Jadi Kita minta agar ini dilakukan seadil-adilnya," katanya.

Pengusutan kader partai lain dalam kasus e-KTP, kata anggota Komisi I DPR RI itu, sangat penting. Pengusutan kasus e-KTP untuk keadilan dan jangan hanya

kader Golkar saja yang dikorbankan.

"Makanya harus dibuka semuanya kalau mau negara ini dibersihkan dari korupsi, jujur, transparan, ya buktikan lah di persidangan ini. Jadi jangan ada ditutup-tutupi," kata dia.

Ia berharap Novanto dapat membuka siapa-siapa saja yang menikmati aliran dana e-KTP itu. Semua aparat keamanan, aparat pengadilan ini juga menyelesaikan dan memberikan keadilan seluruh pihak terkait.

Dalam dakwaan jaksa KPK menyebutkan sejumlah nama yang diduga menikmati uang korupsi e-KTP. Mereka itu di antaranya Gamawan Fauzi (saat itu Menteri Dalam Negeri) sejumlah US\$ 4,5 juta dan Rp 50 juta, lalu Diah Anggraini (saat itu Sekretaris Jenderal Kemdagri) sejumlah US\$ 2,7 juta dan Rp 22,5 juta.

Kemudian ada Anas Urbaningrum sejumlah US\$ 5,5 juta, Melcias Marchus Mekeng

(saat itu Ketua Banggar DPR) sejumlah US\$ 1,4 juta, Olly Dondokambey sejumlah US\$ 1,2 juta, Arif Wibowo (politisi PDI-P) sejumlah US\$ 108.000, Ganjar Pranowo sejumlah US\$ 520.000.

Tidak Adil

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono meyakini Novanto tak sendiri dalam mengurus anggaran proyek e-KTP. Ia meminta KPK mengusut tuntas semua yang terlibat bersama-sama Novanto.

Menurut Ferry, isi surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK seolah memberikan ketidakadilan bagi Novanto. Sebab, nama-nama politisi yang sebelumnya disebut menerima uang, kini tidak dicanumkan dalam surat dakwaan.

"Di Banggar ada Pak Olly, di Komisi ada Pak Ganjar. Sangat lucu, sekarang dikesankan korupsi hanya dilakukan sendirian oleh Novanto," katanya.[H-14]